

# Desak BPK Audit Jamsostek

## ■ ICW Cium Keganjilan Investasi

JAKARTA, TRIBUN - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengelolaan dana titipan pekerja di Jamsostek.

Kordinator ICW Febri Diansyah, yang ditemui di Jakarta, Selasa (18/10), mengatakan, Jamsostek telah mengalami kerugian miliaran rupiah dalam investasi portofolio yang dilakukan secara gegabah.

"Kami melihat ada keganjilan dalam investasi Jamsostek pada Bukopin, Bank Persyari-



NET

Ada keganjilan dalam investasi pada Bukopin, Bank Persyarikatan Indonesia (BPI), pembelian saham Garuda Indonesia, dan lain-lain."

### FEBRI DIANSYAH

Kordinator ICW

katan Indonesia (BPI), pembelian saham Garuda Indonesia, dan lain-lain," kata Febri.

Dana yang ditempatkan di Bukopin, ungkap Febri, mencapai Rp 1 triliun. Padahal, pe-

nempatan dana di Bukopin tidak masuk dalam rencana investasi.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menambahkan, pembelian saham di Garuda Indonesia mengalami kerugian dari dana Rp 120 miliar untuk membeli saham senilai Rp 800 per lembar, sekarang nilainya turun menjadi Rp 500 per lembar.

Di Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) terjadi penurunan nilai saham, yang mengakibatkan kerugian sekurangnya Rp 15 miliar. ICW juga menganggap Jamsostek masih jauh dari transparansi dan anggapan itu didukung oleh sikap jamsostek yang menolak keras pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

ICW menduga sikap itu akibat keengganan Jamsostek yang berbentuk badan privat menjadi badan hukum publik. Pasalnya dengan bentuk badan hukum publik, PT Jamsostek tidak akan bisa menggunakan dana jaminan sosial tanpa kontrol publik.

Humas BPK, Gunarwanto, mengatakan, akan menerima dan mempelajari berkas yang disampaikan.

"Kami akan teruskan kepada pimpinan dan unit kerja terkait, atas permintaan audit investigasi Jamsostek," kata Gunarwanto.

KAJS menilai investasi itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (kompas.com/rpk)